

PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DESA LABUHAN RATU IX KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENUJU OPTIMALISASI PROGRAM SDGs NASIONAL

Ermanita Permatasari, Siti Fatimah, Dewi Trismahwati, Siti Kholijah,
Damanhuri

gainzkahandoko@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

Abstrak

Improving the competitiveness of village government is the main pillar in achieving SDGs as a form of commitment and mainstreaming village development that guarantees justice and village governance that is able to improve the quality of life from one generation to the next. Consideration of providing assistance to increase the capacity of village apparatus and the community of Labuhan Ratu IX Village, Labuhan Ratu District, East Lampung Regency towards optimizing the national SDGs program, namely to support and increase the various potentials possessed by the Village towards achieving SDGs. With the Assistance, Counseling, and Training provided to Village Apparatuses and Communities such as Legal Product Making Training, Capacity Building for Village Apparatuses in the Field of Information and Technology, MSME Training and Assistance, Legal Consultation and Religious Guidance, it is hoped that this can realize Optimization of the Sustainable Development Program National SDGs, so that they can increase the human resource capacity of the Village Apparatus and improve the Economy and Food Security of the Community of Labuhan Ratu IX Village.

Keywords : *SDGs Program, Optimalization, Labuhan Ratu IX Village*

A. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang disebut juga *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan (*goals*) dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. *SDGs* adalah agenda pembangunan dunia yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. *SDGs* ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu *MDGs (Millennium Development Goals)* sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan cakupan 91 persen wilayah pemerintahan Indonesia berbasis pada 74.953 pemerintahan desa, maka strategi pencapaian baik

SDGs Global dan SDGs nasional perlu memanfaatkan potensi tersebut melalui implementasi SDG Desa. Kontribusi pemenuhan tujuan pembangunan desa terhadap sepuluh SDGs nasional yang berorientasi kewilayahan dan perdesaan.¹

SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. *SDGs* akan mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, *SDGs (Sustainable Development Goals)* mempunyai tujuan dan target seperti yang dimaksud diatas, dimana tujuan dan target-target dari *SDGs* ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target *SDGs* tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu.

Secara esensial SDGs mengatur secara komprehensif seluruh aspek pembangunan manusia dan telah lama diadopsi Indonesia. Hasil evaluasi SDGs global, menunjukkan keunggulan Indonesia pada dukungan kebijakan untuk seluruh tujuan pembangunan. Namun, implementasi kegiatan, perwujudan keadilan dan keamanan, serta partisipasi antarpihak masih memiliki kelemahan, terutama terjadi di tataran terbawah struktur pemerintahan kita, yaitu pada tingkat desa. Padahal sesungguhnya sumbangsih desa dari capaian SDGs nasional mencapai 74 persen. Artinya, peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian SDGs. Namun, desa tidak masuk daftar rencana aksi ataupun ukuran penghitungan SDGs nasional.²

Salah satu tujuan yang masih menjadi masalah di hampir seluruh wilayah Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja namun juga dari berbagai aspek yang ada. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Besaran rupiah (pengeluaran) per orang per bulan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi

¹ Sitti Roskina Mas, Arifin Suling, And Ikhfan Haris, "Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi) Dalam Mendukung Pencapaian Sdg Desa," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (July 1, 2021): 87–98, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i2.45>.

² Mas, Suling, And Haris.

kebutuhandasar minimum, untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Pemerintah harus mengupayakan akselerasi aktivitas pengembangan dengan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan Indonesia. Kenapa Desa? Sebab, mayoritas wilayah pembangunan berada di perdesaan. Saat ini, terdapat 514 kabupaten atau kota yang terdiri atas 74.953 desa dan 8.430 kelurahan. Namun, sebanyak 12,06 persen kabupaten masih tergolong daerah tertinggal. Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur, pembangunan harus dimulai dari desa. Oleh karena itu perlu ada pembangunan yang komprehensif terhadap Desa dari segi perbaikan Sumber Daya Manusianya dan memperkuat Ketahanan Pangannya, sehingga optimalisasi SDGs tersebut dapat tercapai diseluruh wilayah indonesia. Diperlukan kerjasama berbagai pihak, Akademisi, Lembaga-lembaga Pemerintah, Pihak swasta, dan lain-lain, untuk menunjang terlaksananya Program SDGs di Indonesia.

Merujuk pada analisis situasi diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Peran Desa dalam Mengoptimalkan Program SDGs di Indonesia serta Bagaimana Cara Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Labuhan Ratu IX dalam rangka mengoptimalkan Program SDGs Nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

Salah satu prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah pelayanan prima dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin.³

Maka dalam hal ini Aparatur Pemerintahan Desa dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, sehingga memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan harus memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas

³ Markus Patiung, "Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 19, No. 1 (June 9, 2019), <https://doi.org/10.30742/jisa1912019686>.

kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap kegiatan pelayanan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Desa Labuhan Ratu IX terbebas dari kendala, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai menjadi salah satu faktor penghambat yang membutuhkan peningkatan kapasitas sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020–2024 yaitu terwujudnya Pedesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Untuk mewujudkan itu, dipandang penting melakukan pendampingan manajemen daya saing Pemerintahan Desa dalam pencapaian 17 tujuan SDGs, diantaranya yang relevan terkait pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan, menghindari kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak, pemenuhan energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, permukiman, konsumsi dan produksi, perubahan iklim, ekosistem daratan, kehidupan yang damai, berkeadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan.⁴

Peningkatan daya saing pemerintahan Desa, menjadi pilar utama dalam pencapaian SDGs sebagai bentuk komitmen dan pengarusutamaan pembangunan desa yang menjamin keadilan dan tata kelola pemerintahan desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵ Pertimbangan dilakukannya pendampingan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur menuju optimalisasi program SDGs nasional, yaitu untuk menunjang dan meningkatkan beragam Potensi yang dimiliki oleh Desa kearah ketercapaian SDGs.

⁴ Novriansyah Reynaldy, “Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019” (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/16441/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/16441/).

⁵ A. Halim Iskandar, *Sdgs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

2. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung dilaksanakan di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, merupakan Pengabdian dalam bentuk Pendampingan, Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan tujuan melakukan usaha untuk Peningkatan Sumber Daya manusia Aparatur Desa dan menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan optimalisasi Program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penelitian berbasis partisipasi yang dikenal dengan istilah *Participatory action research* (PAR). Pada awalnya, Metode PAR dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin pada pertengahan Tahun 1900an yang kemudian dikembangkan oleh Paulo Freire seorang filosof dibidang Pendidikan sebagai kritikan terhadap model Pendidikan tradisional yang menempatkan seorang guru sebagai sumber dan otoritas utama pengetahuan.⁶

Menurut Chambers, PAR merupakan metode yang diangkat dari tradisi kearifan local (*local wisdom*) yang menjadi dasar paradigma ilmu pengetahuan kualitatif. PAR berangkat dari asumsi yang menekankan pada pentingnya proses sosial dan keterlibatan kolektif dalam merumuskan apa yang disebut dengan “kasus yang saat ini terjadi” dan implikasi perubahannya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang sedang berada dalam situasi tersebut.⁷

Participatory Action Research merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

⁶“Participatory Action Research (Par),” *Lbh Jakarta* (Blog), October 25, 2013, <https://Bantuanhukum.Or.Id/Participatory-Action-Research-Par/>.

⁷R. - Chambers, *Pra Participaty Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Robert Cha, Bers, N.D.

Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yolanda Wadsworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.⁸

Secara prinsip, PAR adalah metode riset yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak yang memiliki sumber daya untuk mengkaji tindakan yang sedang terjadi dan bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Tahapan PAR dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, analisis terhadap akar permasalahan sosial, merupakan pintu masuk untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung dilaksanakan Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur sebagai Desa Penyangga Wisata Taman Nasional Way Kambas, dengan subjek dampingan yaitu Aparatur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IX serta Kelompok-kelompok UMKM di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Pendampingan dilaksanakan selama kurun waktu 3 (Tiga) Bulan yaitu dari bulan Agustus sampai Oktober 2022.

Berdasarkan permasalahan prioritas yang harus ditangani, maka strategi yang akan digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah **Pertama**, dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menggali permasalahan serta potensi yang ada di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian **Kedua**, dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dan Pendampingan yang terbagi dalam 3 (*Tiga*) sesi selama 3 (*Tiga*) bulan. Bagaimana meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan

⁸ P. Reason, And H. Bradbury, *The Sage Handbook Of Action Research: Participative Inquiry And Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

Produk Hukum Desa serta Pendampingan Penanganan Konflik Hukum didesa Baik Konflik Keluarga, sengketa tanah, konflik hukum dan Persoalan anak.

Kemudian **Ketiga**, dilanjutkan dengan Pelatihan *Informtion and Technology* (Microsoft Power Point dan Corel Draw), bagi Aparatur Desa sehingga Aparatur Desa bisa membuat Desain berkaitan dengan Promosi Desa Wisata.

Kemudian **Keempat**, dilanjutkan dengan memberikan pelatihan bagaimana memanfaatkan Media Sosial dan Media E-Commerce dalam memasarkan produk-produk dari kelompok UMKM, serta **Kelima**, ditindak lanjuti dengan membantu pemasaran Produk-produk UMKM milik kelompok mitra dengan cara mendampingi kelompok dalam memanfaatkan media pemasaran online dengan media sosial seperti *Instagram, Facebook*, lapak jual beli *online* menggunakan aplikasi *shopee dan toko pedia*.

Salah satu kebijakan umum Desa Labuhan Ratu IX adalah untuk menumbuhkan ketahanan dan sikap kemandirian anggota masyarakat serta peningkatan peran segenap unsur masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga tercipta Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Banyaknya Potensi Desa Labuhan Ratu IX, baik Usaha Kuliner maupun wisata desa jika tidak dikelola dengan baik dan diimbangi dengan kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing, akan menjadi sia-sia dan tidak berkembang, maka diperlukan kerjasama berbagai pihak baik Pemerintahan Desa, masyarakat serta *stake holder* untuk mendukung Program SDGs nasional ini bisa berjalan dengan optimal di Desa Labuhan Ratu IX.

Kegiatan Pendampingan, Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan tujuan melakukan usaha untuk Peningkatan Sumber Daya manusia Aparatur Desa dan menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan optimalisasi Program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Nasional.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dilakukan untuk meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan

Produk Hukum Desa serta Pendampingan Penanganan Konflik Hukum didesa Baik Konflik Keluarga, sengketa tanah, Kekerasan dalam rumah tangga dan Persoalan anak. Pelatihan *Information and Technology* (Pembuatan Desain dengan menggunakan Microsoft Power Point dan Corel Draw serta Pembuatan Vidio), bagi Aparatur Desa sehingga Aparatur Desa dapat membuat Desain dan vidio berkaitan dengan Kegiatan Pemerintahan Desa, Peningkatan UMKM dan Promosi Desa Wisata.

Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan memberikan pelatihan pemanfaatan Media Sosial dan *Media E-Commerce* dalam memasarkan produk-produk dari kelompok UMKM, serta ditindak lanjuti dengan membantu pemasaran Produk-produk UMKM milik kelompok mitra dengan cara mendampingi kelompok dalam memanfaatkan media pemasaran online dengan media sosial seperti *Instagram, Facebook*, lapak jual beli *online* menggunakan aplikasi *shopee dan toko pedia*.

Karena Produk-produk UMKM yang banyak tanpa melakukan Pemasaran yang baik akan sulit untuk mengembangkan usaha dari kelompok-kelompok tersebut. Dengan melakukan pemasaran tidak hanya secara klasik yaitu jual beli secara offline, akan tetapi juga mulai memasarkan produknya secara online dengan memanfaatkan media sosial serta media *E-Commerce* diharapkan dapat meningkatkan kuantitas penjualan secara signifikan.

Desa Labuhan Ratu IX juga merupakan Desa Penyangga Wisata Taman Nasional Way Kambas, dimana Desa yang terletak berbatasan langsung dengan Hutan konservasi taman nasional way kambas ini memiliki begitu banyak potensi wisata terutama *edutourism* baik wisata budaya, kuliner, dan satwa dalam hal ini adalah burung liar. Potensi tersebut merupakan hal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pengelolaan yang baik salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, baik Pemerintahan Desa, Pelaku-pelaku UMKM maupun masyarakat Desa pada umumnya.

Maka STAI Darussalam Lampung melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Labuhan Ratu IX agar dapat memberikan manfaat secara keilmuan terhadap seluruh masyarakat menuju Desa Wisata yang maju dan berdaya saing dengan kondisi ekonomi kerakyatan yang sejahtera. Terlihat muluk namun dengan kerjasama berbagai pihak, serta semangat dan kerja keras masyarakat maka optimalisasi tujuan SDGs ini dapat segera tercapai.

Sehingga diakhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IX bersama Pelaku-pelaku UMKM dan seluruh masyarakat sudah dapat mulai membuat konsep-konsep dan Promosi Desa Wisata, Paket wisata, Pemasaran Produk-produk UMKM melalui media digital serta Penanganan konflik hukum yang terarah dan solutif untuk masyarakat.

C. KESIMPULAN

Peningkatkan daya saing pemerintahan Desa, menjadi pilar utama dalam pencapaian SDGs sebagai bentuk komitmen dan pengarusutamaan pembangunan desa yang menjamin keadilan dan tata kelola pemerintahan desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertimbangan dilakukannya pendampingan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur menuju optimalisasi program SDGs nasional, yaitu untuk menunjang dan meningkatkan beragam Potensi yang dimiliki oleh Desa kearahketercapaian SDGs.

Dengan adanya Pendampingan, Penyuluhan, dan Pelatihan yang diberikan terhadap Aparatur Desa dan Masyarakat seperti Pelatihan Pembuatan Produk Hukum, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang *Information and Technology*, Pelatihan dan Pendampingan UMKM, Konsultasi Hukum dan Pembinaan ke Agama diharapkan, dapat mewujudkan Optimalisasi Program Pembangunan berkelanjutan SDGs Nasional, sehingga bisa meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Aparatur Desa serta meningkatkan Perekonomian dan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Labuhan Ratu IX.

DAFTAR PUSTAKA

I- Chambers, R. *Pra Participaty Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Robert Cha. Bers., N.D.

Alfa, Akbar. “Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 5, No. 1 (August 20, 2019). <https://doi.org/10.47521/Selodangmayang.V5i1.118>.

Iskandar, A. Halim. *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

- Mas, Sitti Roskina, Arifin Sukung, And Ikhfan Haris. “Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Embangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi) Dalam Mendukung Pencapaian Sdg Desa.” *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (July 1, 2021): 87–98. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i2.45>.
- Lbh Jakarta. “Participatory Action Research (Par),” October 25, 2013. <https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/>.
- Patiung, Markus. “Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 19, No. 1 (June 9, 2019). <https://doi.org/10.30742/jisa1912019686>.
- Reynaldy, Novriansyah. “Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019.” Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/16441/>.